

KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA: Dari Pemimpin Pergerakan, Pemimpin Pejuang, Pemimpin Pembangun ke Pemimpin yang Baik

Zulfikri Suleman

Zuleman2003@yahoo.com

FISIP Universitas Sriwijaya

Abstrak

Untuk bangsa Indonesia dewasa ini yang masih sedang dalam proses transisi, kepemimpinan masih merupakan variabel bebas yang amat penting dalam menentukan proses pembangunan bangsa (KOMPAS, 6 Mei 2008, hal. 2). Sejarah perjalanan bangsa Indonesia modern telah mengenal beberapa tipe kepemimpinan: pemimpin pergerakan, pemimpin pejuang dan pemimpin pembangun. Masing-masing tipe kepemimpinan tersebut mewujudkan dalam beberapa pribadi pemimpin dan telah menorehkan kesan yang mendalam dalam sejarah perjalanan bangsa kita sesuai dengan tuntutan zamannya. Tulisan ini ingin mengangkat topik “pemimpin yang baik” sebagai pelanjut yang tepat dalam estafet perjalanan bangsa kita di era Reformasi sekarang ini. Ini adalah topik yang sederhana tapi amat penting dalam mengatasi berbagai kesulitan yang sedang mendera bangsa kita sekarang ini. Yang dimaksud dengan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lebih menekankan pada kepemilikan kualitas moral ketimbang ukuran-ukuran manajemen dan teknokrasi, atau pemimpin yang lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Dengan logika berpikir reflektif dan historis, ingin dikemukakan nanti bahwa berbagai masalah serius yang masih merundung bangsa Indonesia sekarang ini – kemiskinan, pengangguran, kebodohan, KKN – terutama disebabkan karena absennya pemimpin-pemimpin yang baik, baik di tingkat nasional mau pun di daerah-daerah. Dengan kata lain, kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik akan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari lumpur keterbelakangan dan selanjutnya membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Kata-kata kunci: kepemimpinan, moral, pemimpin yang baik.

Latar Belakang

Apabila tugas umum seorang pemimpin adalah membawa orang-orang yang dipimpinnya ke arah tujuan yang hendak dicapai, tugas pemimpin Indonesia modern tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki rasa aman, sejahtera, terdidik dan menjadi partisipan aktif dan konstruktif dalam tata pergaulan internasional. Ini berarti bahwa tugas mengisi kemerdekaan identik dengan merancang program-program pembangunan yang akan memudahkan rakyat mencapai tujuan-tujuan di atas. Karena program-program pembangunan dirancang dan dilaksanakan oleh para pemimpin, dengan segala kemungkinan akibat negatifnya bagi rakyat, peranan dan tanggungjawab pemimpin-pemimpin ini pantas ditanyakan dan dinilai.

Tulisan ini akan membahas topik “pemimpin yang baik” dari cara pandang etik dan moral, bukan dari ukuran-ukuran manajemen kepemimpinan dan teknokrasi, apalagi dari ukuran ideologi tertentu. Ini adalah topik yang sederhana dan bahkan bagi sebagian orang mungkin topik yang remeh, tidak imperatif dan karena itu tidak memiliki manfaat praktis. Tulisan ini berpendapat, membahas pemimpin yang baik amat penting, khususnya dalam keadaan bangsa kita dewasa ini yang masih miskin, banyak pengangguran dan tertinggal bahkan dari bangsa-bangsa tetangga di Asia Tenggara. Selanjutnya diyakini, kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik akan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari semua bentuk keterbelakangan tersebut dan selanjutnya mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Telaah Literatur

Apa yang dimaksudkan dengan moral dalam kaitannya dengan manusia? Franz Magnis-Suseno mengemukakan, manusia (termasuk pemimpin, ZS) yang baik secara moral hanya tunduk pada satu ukuran: kebenaran¹. Sesuatu dianggap benar apabila bermanfaat bagi kemanusiaan, memuliakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, moralitas mengatasi sekat-sekat atas nama SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Dengan batasan seperti ini, misalnya, tindakan penganiayaan terhadap pemeluk suatu agama minoritas oleh penganut agama mayoritas tidak saja ditolak oleh para penganut agama minoritas tersebut tapi juga harus dikecam oleh para penganut agama lain. Contoh lain, seseorang dikatakan baik bukan karena embel-embel yang melekat di dirinya, misalnya baik sebagai dosen atau baik sebagai

¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 5.

pedagang, tapi karena kemanusiaannya, misalnya karena ia amat membenci kekerasan atau karena ia tidak mau mengambil hak orang lain. Dengan kata lain, sikap mengutamakan kebenaran ini adalah hadirnya manusia-manusia yang tidak mau berbohong, yaitu manusia yang memiliki keberanian untuk mengkritisi orang lain, termasuk penguasa, serta kejujuran, dalam arti kesediaan untuk dikritisi agar selubung-selubung atas nama motif-motif dan ideologi tertentu dapat diketahui. Selanjutnya, mencintai kebenaran juga melahirkan sikap bertanggungjawab, yaitu kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan dan pilihan yang diambil. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dengan jujur bahwa suatu pilihan kebijakan bukan hanya bermanfaat bagi pengambil kebijakan tersebut melainkan juga mengandung kebenaran, yaitu pembuktian bahwa pilihan kebijakan tersebut lebih unggul dibandingkan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang lain. Asumsi dasar dibalik sikap bertanggungjawab ini adalah fakta bahwa, berbeda dengan binatang yang bertindak secara naluriah sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, sikap dan keputusan yang diambil oleh seseorang adalah pilihan secara sadar yang akan mempengaruhi hidup orang lain. Di masa peradaban modern sekarang ini, pilihan dan kuasa manusia terhadap alam nyaris tak terbatas yang dengan demikian juga menambah kemungkinan atau potensi daya rusaknya terhadap kualitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu sikap bertanggungjawab merupakan kualitas moral yang bersifat imperatif.

Keshavan Nair, dengan mengacu pada kepemimpinan Gandhi, menambahkan jiwa pengabdian dan keharusan mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai ukuran kepemimpinan yang baik². Pengabdian dibicarakan dalam konteks hubungan, dalam hal ini hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin (rakyat). Pengabdian berarti berbuat baik untuk rakyat seolah-olah berbuat baik untuk diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Gandhi meyakinkan, “Jika kita semua menolak untuk mengabdikan, karena menunggu sampai kita mencapai kesempurnaan, maka selamanya tidak akan pernah ada pengabdian. Ternyata, kesempurnaan hanya dapat dicapai melalui pengabdian”³.

Franz Magnis-Suseno selanjutnya menyebutkan tiga norma perilaku manusia: sopan santun, hukum dan moral⁴. Di sini perlu ditambahkan, dalam hal terjadi tabrakan, terutama, antara

² Keshavan Nair, *Kepemimpinan Berstandar Moral Lebih Tinggi: Ajaran dari Kehidupan Gandhi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 49-62.

³ *Ibid.*, hal. 50.

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1983, hal. 19-20.

hukum dengan moral, norma hukum harus dikorbankan⁵. Dengan pernyataan seperti ini, yang dimaksudkan sebenarnya adalah norma hukum positif yang ditetapkan penguasa, yang berdasarkan ideologi tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin, menganggap sah kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, kepemilikan kualitas moral harus mendasari sikap dan perilaku manusia, khususnya sikap dan perilaku para pemimpin.

Pembahasan

1. Pemimpin Pergerakan dan Pemimpin Pejuang

Indonesia modern, secara kasar, telah mengenal beberapa tipe kepemimpinan: pemimpin pergerakan, pemimpin pejuang dan pemimpin pembangun. Pemimpin pergerakan adalah para pahlawan awal kita yang menggerakkan kaum bumiputera ke wawasan baru: arti penting pendidikan dan memperkenalkan cara-cara perjuangan modern dalam menentang penjajah, yaitu melalui organisasi (partai politik). Mereka juga telah berjasa menyemaikan bibit-bibit keindonesiaan yang berpuncak pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ki Hadjar Dewantara, dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Soetomo, K.H. Achmad Dahlan, H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, Muhammad Husni Thamrin, R.A. Kartini dan H. Samanhudi adalah beberapa nama pemimpin pergerakan yang menonjol di jamannya. Meskipun tidak sepenuhnya dapat dibedakan dari pemimpin generasi pergerakan, pemimpin pejuang identik dengan Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka. Berbeda dengan pemimpin pergerakan yang tidak secara jelas memperjuangkan Indonesia merdeka dan bahkan beberapa di antaranya bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, pemimpin pejuang secara nyata menyebut Indonesia merdeka sebagai sasaran perjuangan mereka yang dengan demikian bersikap non-kooperatif dan bahkan konfrontatif terhadap rejim kolonial. Makalah ini tidak akan mengulas perbedaan, persamaan mau pun proses perjuangan masing-masing lapisan kepemimpinan ini. Yang akan disinggung di sini adalah beberapa kualitas moral yang melekat pada mereka, yang membuat mereka senantiasa dikenang sebagai para pahlawan dalam sejarah perjalanan hidup bangsa kita. Karena yang mereka hadapi adalah pemerintah kolonial yang represif dan eksploitatif, visi yang jelas, kewajiban, tanggungjawab, keberanian dan ketabahan dalam penderitaan adalah beberapa kata kunci untuk memahami warisan pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang ini.

⁵ Thomas Aquinas mengemukakan, hukum yang bertentangan dengan nilai moral (yang disebutnya hukum kodrat) kehilangan segala kekuatan hukumnya; lihat *ibid.*, hal. 21.

Tidak diragukan lagi, pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang telah mewariskan nilai-nilai moral yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Ketika Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa identitas suatu bangsa terkubur dalam sejarah masa lalu bangsa tersebut (dalam bentuk pemikiran, semangat kejuangan dan teladan sikap dan perilaku para pahlawan nasional), untuk Indonesia, sejarawan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang adalah pembentuk identitas Indonesia modern⁶. Mengenai pemikiran, meskipun seringkali dibedakan antara pemikiran Soekarno yang obsesif tentang persatuan bangsa, pemikiran Hatta tentang demokrasi atau pemikiran Sjahrir tentang sosialisme kemanusiaan, gagasan para pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang ini terwujud dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dengan demikian, secara jelas ditunjukkan bahwa kemerdekaan, anti penjajahan, kemanusiaan dan keadilan adalah visi tentang Indonesia masa depan, nilai-nilai luhur yang membentuk identitas bangsa Indonesia dalam sejarah perjalanan berikutnya. Rumusan nilai-nilai ini bukan saja dibentuk oleh pengalaman pahit penjajahan selama periode ratusan tahun yang mungkin menimbulkan kebencian dan dendam terhadap bangsa-bangsa penjajah Barat, yang lebih penting lagi, nilai-nilai tersebut merupakan sublimasi dari perenungan panjang para Bapak Pendiri Bangsa kita ini tentang hakikat kemanusiaan (*humanity*) yang bersifat universal, sehingga melahirkan kata-kata “... sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”.

2. Pemimpin Pembangun

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pemimpin pembangun, pertama, adalah para pemimpin yang bertugas mengisi kemerdekaan di masa Orde Baru, 1966-1998. Alasan di balik pilihan ini adalah kenyataan bahwa proses pembangunan dalam arti yang sebenarnya baru berlangsung di masa Orde Baru ini. Bermodalakan stabilitas politik dan keamanan yang didukung penuh oleh ABRI, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melancarkan program pembangunan nasional secara bertahap dan sistematis melalui PELITA (Pembangunan Lima Tahun) dengan fokus pada pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Dapat juga dikemukakan bahwa ideologi pembangunan (*developmentalisme*) merupakan ciri khas masa Orde Baru ini.

⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990, hal. xv.

Bagaimana pertanggungjawaban moral para pemimpin pembangun di masa Orde Baru ini. Tentu saja makalah dengan halaman terbatas ini tidak akan memadai membahas semua aspek moral dari semua kebijakan pemimpin Orde Baru. Secara singkat dapat dikemukakan, karena pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan totaliter, dengan pembangunan nasional yang bersifat kapitalis, masif dan ekshaustif, tentu saja isu-isu moral amat relevan dipertanyakan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), pengurusan sumberdaya alam tanpa terkendali, kesenjangan sosial-ekonomi dan praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) adalah beberapa warisan utama para pemimpin pembangun ini, yang akibat-akibat negatifnya masih dapat dirasakan sampai sekarang ini. Fakta bahwa Presiden Soeharto bulan Mei 1998 dipaksa mengundurkan diri, terutama, oleh kekuatan mahasiswa serta hujatan menyakitkan yang kemudian diterimanya cukup menjelaskan bahwa Presiden Soeharto beserta rejim Orde Baru-nya sudah kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.

Era Reformasi sudah berlangsung selama lima belas tahun dan bahkan sudah mengalami empat masa pemerintahan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjalani masa pemerintahan terlama, berlangsung sejak tahun 2004. Meskipun berhasil menjalani dua periode pemerintahannya, dengan program-program pembangunan yang relatif stabil dan berkesinambungan, tidak berarti para pemimpin di masa pemerintahan Presiden SBY ini tidak bisa dipertanyakan secara moral. Yang paling menyolok adalah praktek korupsi oleh para pemimpin di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, baik di pusat mau pun di daerah. Melakukan korupsi berarti mencuri uang negara yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat. Di lain pihak, pembangunan dirancang dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara yang lebih maju, baik melalui peningkatan utang luar negeri mau pun melalui peningkatan porsi modal asing dalam kekuatan ekonomi nasional. Data yang ada menunjukkan, 50,6% aset perbankan nasional sudah dikuasai pihak asing. Di bidang pertambangan, penguasaan asing adalah sebagai berikut: migas 70%, batubara, bauksit, nikel dan timah 75%, tembaga dan emas 85%⁷. Dominannya penguasaan asing juga terlihat di sektor telekomunikasi dan perkebunan. Apabila diyakini bahwa pembangunan yang bertumpu pada kekuatan modal asing hanya akan mengekalkan struktur-struktur ketidak-adilan dalam masyarakat⁸, menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban moral para pemimpin pembangun di era Reformasi sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan.

⁷ Lihat *KOMPAS*, 7 November 2013, hal. 1.

⁸ Lihat Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 39-48.

3. Pemimpin yang Baik

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan kebenaran, jujur, bertanggungjawab, berjiwa pengabdian dan lebih mendahulukan kewajiban/tanggungjawab daripada hak. Karena kualitas moralnya yang tinggi, pemimpin yang baik selamanya amat penting dalam kehidupan bersama, satu hal yang bahkan sudah dikemukakan sejak masa Confusius kira-kira 500 SM. Sahdan, pada suatu hari Confusius ditanya oleh salah seorang muridnya tentang syarat-syarat terwujudnya kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Jawab Confusius, ada tiga syarat: keamanan, pangan dan pemimpin yang baik. Ketika murid tersebut bertanya, “Apabila dikurangi satu syarat, mana yang harus dikorbankan?” Jawab Confusius, “Keamanan”. Ketika sang murid bertanya lagi, “Dari dua syarat yang tersisa harus dikorbankan satu lagi, mana yang harus dikorbankan?”. Jawab sang Guru, “Pangan”. Dengan kata lain, dalam suatu masyarakat biarlah terjadi ketidak-amanan dan kelaparan. Asal masih ada pemimpin-pemimpin yang baik, masyarakat tersebut masih memiliki harapan untuk menjadi masyarakat yang damai dan sejahtera. Berikut ini adalah beberapa contoh yang baik (*best practices*) tentang pemimpin-pemimpin yang baik yang disarikan dari berbagai sumber referensi. Yang pertama adalah cerita tentang Rasulullah yang sedang menjadi imam sholat. Para sahabat yang menjadi makmum mendengar suara gemeretak setiap Rasulullah menggerakkan badannya karena rukuk, sujud dan bangkit lagi. Setelah shalat selesai, Umar memberanikan bertanya kalau-kalau Rasulullah menderita sakit. Nabi menyatakan bahwa ia sehat-sehat saja. Tapi ketika didesak terus, Nabi terpaksa mengangkat jubahnya sehingga menampakkan perutnya yang dililit sehelai kain yang berisi batu-batu kecil. Para sahabat sadar, itu cara Nabi untuk menahan lapar. Umar setengah berteriak berkata, “Ya, Rasulullah, apakah bila Anda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami akan diam saja?”. Rasulullah dengan tenang menjawab, “Tidak para sahabatku. Aku tahu, apa pun akan engkau korbankan demi Rasulmu ini. Tetapi apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya?”. Rasulullah menambahkan, kelaparaan yang dirasakannya adalah bagian dari pengabdian kepada umatnya agar umatnya tidak merasakan kelaparan dalam kehidupannya di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat kelak.

Kedua adalah cerita tentang pahlawan nasional kita, Muhammad Natsir. Ketika Natsir berhenti jadi perdana menteri awal tahun 1950-an, di hari terakhir masa jabatannya, Natsir dengan mengendarai sendiri mobil dinasnyanya datang ke istana untuk mengembalikan mandat pemerintahannya kepada Presiden Soekarno, diikuti di belakangnya oleh sopirnya yang

mengendarai sepeda. Setelah mandat pemerintahannya dikembalikan, Natsir sekaligus ingin mengembalikan mobil dinas. Ketika petugas menanyakan, setelah dikembalikan, dengan apa Natsir akan kembali ke rumah dan menawarkan untuk diantar, Natsir menolak sambil menunjuk sopirnya yang sedang menunggu di luar dengan sepedanya. Natsir pulang ke rumah dengan diboncengi sepeda oleh sopirnya. Kemuliaan budi pekerti ini membuat Natsir kemudian dijuluki pengikut dan pengagumnya “hati nurani umat”.

Selanjutnya adalah cerita yang berhubungan dengan ungkapan Belanda, *leiden is lijden* (memimpin berarti menderita). Harap diingat bahwa ungkapan ini diucapkan oleh Kasman Singodimedjo tahun 1925 ketika ia masih menjadi pelajar STOVIA di Batavia. Ceritanya, demi mendapatkan pendidikan politik dari Haji Agus Salim, pemuda Kasman dan teman-temannya kadang-kadang mendatangi rumah Haji Agus Salim; mereka datang naik sepeda. Suatu hari, karena habis hujan lebat dan jalan tanah yang dilalui becek dan liat, sehingga roda sepeda tidak bisa dikayuh, pemuda Kasman terpaksa memanggul sepedanya di bahu sampai ke rumah *the grand old man tersebut*. Demi melihat pemuda Kasman memanggul sepeda, Haji Agus Salim dengan bergurau mengatakan bahwa hari itu peranan manusia dan sepeda terbalik. Saat itulah pemuda Kasman menanggapi dalam bahasa Belanda, “*Een leidersweg is een lijden sweg. Leiden is lijden*” (Jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin adalah jalan yang menderita).

Kita masih bisa menambahkan banyak lagi contoh teladan yang baik dari para pemimpin dengan moralitas yang tinggi. Mahatma Gandhi adalah pemimpin besar India dengan ajaran moral yang tinggi; ia ingin menyatukan bangsa India tanpa dibatasi oleh sekat-sekat kasta, etnis dan agama. Terhadap kolonialisme Inggris, Gandhi melancarkan perjuangan tanpa kekerasan dan prinsip mandiri. Apa pun ceritanya, inti dari pemimpin yang baik adalah sikap dan perilaku mengabdikan dengan tulus kepada rakyat yang dilandasi oleh kesediaan untuk mendahulukan kewajiban dan tanggungjawab daripada hak. Relevansi dari sikap dan perilaku seperti ini makin terasa untuk masyarakat dan bangsa Indonesia sekarang ini yang masih dihadapkan pada berbagai bentuk keterbelakangan. Pemimpin-pemimpin yang mengabdikan dengan tulus dan lebih mementingkan kewajiban dan tanggungjawab daripada hak akan didukung dengan ikhlas oleh para pengikutnya, yang dengan demikian akan menyatukan semangat dan segenap sumberdaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Kesimpulan dan Saran

Untuk bangsa yang sedang menghadapi banyak kesulitan seperti Indonesia sekarang ini, kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik amat penting. Pemimpin-pemimpin yang baik, misalnya yang lebih mengutamakan pengabdian dan tanggungjawab kepada rakyat, sehingga memberikan contoh dan teladan yang baik, akan mampu mendorong rakyat untuk bekerja dengan ikhlas yang dengan demikian akan meningkatkan kinerja dan produktivitas masyarakat. Tentu saja tidak bisa diingkari bahwa pembangunan nasional juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkemampuan teknis dan manajerial. Yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini adalah *appeal* agar semakin banyak hadir pemimpin-pemimpin yang baik di semua lapisan masyarakat, mulai di tingkat rukun tetangga (RT) sampai ke tingkat nasional, termasuk juga pemimpin-pemimpin informal. Apabila disepakati bahwa pemimpin-pemimpin sekarang memiliki kualitas moral yang rendah, Pemilu 2014 nanti diharapkan akan menjadi momentum yang tepat bagi kemunculan pemimpin-pemimpin yang baik ini.

DAFTAR PURTAKA

Buku-buku:

Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990.

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

_____, *Kuasa dan Moral*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

_____, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1983.

Nair, Keshavan, *Kepemimpinan Berstandar Moral Lebih Tinggi: Ajaran dari Kehidupan Gandhi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Rasyid, Muhammad Ryaas, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.

Ridwan, M. Deden dan Asep Gunawan (editor), *Demokratisasi dan Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru*, diterbitkan oleh LSAF bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 1999.

Santosa, M.Hum., Ir. Heru, *Landasan Etis bagi Perkembangan Teknologi*, Penerbit PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000.

Suhatno, Darto Harnoko, Tashadi, Suratmin, *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Haji Agus Salim dan Muhammad Husni Thamrin*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

Koran:

KOMPAS, 7 November 2013.

KOMPAS, 25 Oktober 2013.